



# Dana Dipangkas RP 3,8 Triliun

**Balai Kota, Warta Kota**

Anggaran senilai Rp 3,8 triliun dipangkas dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2015. Adanya pemangkasan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan pembelian beberapa lahan.

Prabowo Soenirman, anggota Komisi C DPRD DKI, mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut merupakan risiko Pemprov menggunakan peraturan gubernur pada APBD DKI.

Prabowo mengatakan, nantinya pemangkasan anggaran itu tidak mengganggu pembangunan di Jakarta.

"Kami sudah sepakat pakai pergub bukan perd. Artinya Gubernur punya keleluasaan. DPRD tidak punya kewenangan untuk mengatur penganggaran. Itu risikonya menggunakan pergub. Silakan saja. Asal pembangunan di Jakarta tidak terhambat," kata Prabowo kepada Warta Kota, Minggu (29/3).

Prabowo mengatakan, dengan menggunakan pergub, DPRD akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran lebih ketat. DPRD akan mengecek ke lapangan lebih sering.

"Dari proses lelang sampai pelaksanaan akan kami awasi lebih ketat. Kami akan cek ke lapangan sesering mungkin," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Bahkan, DPRDD telah merencanakan untuk melakukan rapat dan pengecekan ke lapangan secara terjadwal. "Kami akan lakukan penjadwalan. Yaitu melakukan rapat dengan SKPD sebanyak tiga kali dalam seminggu dan mengecek ke lapangan setiap hari," kata Prabowo.

**Selisih**

Sementara itu, Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, mengatakan, dalam penyusunan KUA-PPAS 2015 yang disesuaikan dengan pagu anggaran belanja daerah APBD DKI 2014, terdapat selisih anggaran sebesar Rp 3,8 triliun.

"Untuk selisih tersebut didapat dari pagu belanja daerah dalam KUA-PPAS 2015 sebesar Rp 67,4 triliun dikurangi pagu belanja daerah APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 63,65 triliun," kata Heru.

Untuk pemangkasan anggaran difokuskan dalam belanja pengadaan lahan. Pemangkasan lahan tersebut ada di Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta Dinas Kelautan, Pertanian dan Pertahanan. (suf)

**Anggaran yang Dipangkas**

1. Dinas Tata Air: Pembelian lahan Rp 500 miliar
2. Dinas Tata Air: Pembangunan Tanggul Laut (NCICD) Rp 300 miliar
3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda: Belanja rumah dan bangunan bersejarah di lima wilayah Rp 500 miliar
4. Dinas Bina Marga: Pembelian lahan Rp 500 miliar
5. Dinas Pemakaman dan Pertamanan: Pembelian lahan Rp 500 miliar
6. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan: Pembelian lahan Rp 500 miliar
7. BPAKD DKI : Rp 300 miliar
8. Dinas Olahraga dan Pemuda: Rehab GOR di lima wilayah Rp 300 miliar
9. Lima Pemkot dan Satu Pemkab: Pembelian tanah Rp 400 miliar